

Dinsos DKI Tepis Isu Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 di Jakarta

JAKARTA (IM) - Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) DKI Jakarta, Premi Lasari menepis isu dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang dilakukan PD Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun. Menurutnya kontrak dengan PD Pasar Jaya berakhir 31 Desember 2020 lalu.

"Intinya memang kalau kami sih memang pernah berkontrak dengan PD Pasar Jaya. Tetapi kan kontrak itu berakhir di 31 Desember 2020," kata Premi kepada awak media di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (13/1).

"Saya pastikan kami berkontrak habis di 31 Desember 2020," tambahnya.

Premi menyebut bahwa pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah dilakukan terkait bansos Covid-19 pada 2021-2022. Ia mengaku sudah pernah menjelaskan ke KPK. "Pemeriksaan sudah di 2021, 2022. Saya juga sudah pernah menjelaskannya di KPK," ucapnya.

Premi pun siap memberikan keterangan lebih lanjut bila KPK menelusuri kasus dugaan korupsi bansos tersebut. "Jelas dong, sebagai perangkat daerah kita harus memberikan keterangan sebaik baiknya," tuturnya.

Sebelumnya, pegiat media sosial Rudi Valinka lewat laman Twitter pribadinya @kurawa mencuit soal temuan dugaan korupsi Bansos DKI Tahun 2020 senilai Rp2,85 Triliun.

"Temuan Dugaan Ko-

rupsi Program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp2,85 Triliun," cuit laman Twitter @kurawa yang diunggah 9 Januari 2023 lalu.

Rudi menjelaskan awal mula menerima informasi dari seseorang dengan temuan penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya Tahun Anggaran 2020 yang masih tersimpan di sebuah gudang kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Ia pun menyebut anggaran Bansos DKI tahun 2020 menggunakan APBD DKI senilai Rp3,65 Triliun dalam bentuk paket sembako yang mana porsi terbesar dipegang Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun.

"Semua berawal dari info *mbistle blower* yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di Gudang sewaan di Pulogadung, Kita *flashback* dulu latar belakang Bansos DKI tahun 2020 untuk penanggulangan dampak Covid-19 yang terjadi di Jakarta yang diambil dari APBD DKI senilai Rp3,65 Triliun dalam bentuk paket sembako," jelasnya.

"Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station dan PT Trimedia Imaji Reksa Abadi. Di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa? Nah," tambahnya. ● **yan**

Ini Titik-titik Wilayah Berpotensi Tanah Bergerak di Jakarta Periode Januari 2023

JAKARTA (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya mitigasi terkait potensi tanah bergerak di sejumlah wilayah ibu kota akibat fenomena pergerakan tanah.

Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI, Michael Sitanggang berharap kepada masyarakat untuk selalu memantau BPBD DKI.

Pasalnya, kata dia, BPBD akan memberikan informasi peringatan dini pergerakan tanah yang bersumber dari PVMBG melalui *website bpbd.jakarta.go.id*.

"Dan media sosial BPBD DKI, sebagai langkah kesiapsiagaan bagi masyarakat," kata Michael di Jakarta, Jumat (13/1).

Selain itu, BPBD DKI juga turut mengimbau kepada masyarakat yang berada di kawasan sekitar sungai untuk tidak menebang pohon di sekitar lereng dan tidak melakukan pemotongan lereng secara tegak lurus untuk menghindari kejadian tanah longsor.

"Mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di sekitaran lereng apabila hujan deras melanda di sekitarnya," imbuhnya.

Tak hanya itu, BPBD DKI juga menyarankan, warga untuk melakukan koordinasi dengan aparat kewilayahan seperti Lurah dan Camat untuk memantau titik-titik yang rawan longsor, bersama dengan Tim Reaksi Cepat BPBD DKI.

"Menyiagakan layanan kedaruratan melalui nomor 112 agar masyarakat dapat melaporkan keadaan darurat yang dialami atau ditemui dan juga bisa dilaporkan melalui aplikasi JAKI "ujarnya.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkap sejumlah wilayah di ibu kota yang berpotensi mengalami pergerakan tanah pada periode Januari 2023.

Hal tersebut berdasarkan informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, prakiraan potensi terjadi gerakan tanah disusun berdasarkan hasil tumpang susun (*overlay*) antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan.

Berikut beberapa daerah di DKI Jakarta berada di Zona menengah, yaitu:

- Jakarta Pusat, meliputi wilayah Kecamatan Menteng.

- Jakarta Selatan, meliputi wilayah Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, dan Tebet.

- Jakarta Timur, meliputi wilayah Kecamatan Cakung, Kramatjati, Matraman, Pasar Rebo, dan Pulo Gadung.

Isnawa menerangkan, pada Zona Menengah dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. "Sementara pada zona tinggi, gerakan tanah lama dapat aktif kembali," ucap Isnawa.

Untuk itu, mantan Plt Wali Kota Jakarta Selatan ini meminta kepada Lurah, Camat, dan masyarakat diimbau untuk tetap mengantisipasi adanya potensi gerakan tanah pada saat curah hujan di atas normal. ● **yan**

4 | Metropolis

FOTO:ANT



PENJUALAN PERNAK-PERNIK IMLEK DI GLODOK

Calon pembeli melihat pernak-pernik imlek yang dijual di kawasan kawasan Glodok, Jakarta, Jumat (13/1). Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili pada 22 Januari 2023 kawasan pecinan Glodok dipenuhi dengan penjualan berbagai macam pernak pernik untuk merayakan Imlek yang dijual dengan mulai puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah.

Soal ERP, Pemprov DKI Diminta Pertimbangkan Kondisi Ekonomi

Titik-titik ERP ini dipasang adalah di jalan-jalan yang lokasinya adalah tempat ekonomi yang sangat aktif. Sehingga jika ada potensi terhambatnya mobilitas, dan potensi menurunnya aktivitas ekonomi. Ini harus dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta. Apakah ERP ini bisa menghambat mobilitas yang berdampak pada penurunan aktifitas ekonomi.

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan kajian mendalam terkait rencana penerapan kebijakan *electronic road pricing* (ERP) atau jalan berbayar secara elektronik di wilayah DKI Jakarta.

William memahami, penerapan ERP atau jalan berbayar merupakan salah satu upaya untuk mengatasi

kemacetan di Jakarta. Namun, menurutnya, Pemprov DKI perlu menimbang sejumlah faktor, salah satunya terkait kondisi ekonomi masyarakat.

"Pertama kita harus melihat bahwa kebijakan ERP ini tidak hanya persoalan kemacetan, tetapi juga persoalan ekonomi. Jadi kalau kita lihat ERP ini kan pasti akan potensi menghambat mobilitas, karena ada tarif yang dikenakan kepada pengendara yang lewat di jalan tersebut," kata William di Jakarta, Jumat

(13/1).

William menjelaskan, titik-titik ERP ini dipasang di jalan-jalan yang lokasinya adalah tempat ekonomi yang sangat aktif. Sehingga jika ada potensi terhambatnya mobilitas, dan potensi menurunnya aktivitas ekonomi.

"Nah, ini harus dilakukan kajian dengan sangat baik oleh Pemprov DKI Jakarta. Apakah ERP ini bisa menghambat mobilitas yang berdampak pada penurunan aktifitas ekonomi," terangnya.

William meminta Pemprov DKI belajar dari kasus Covid-19 ketika Jakarta menerapkan PSBB. Saat itu, PSBB berdampak terhadap terhambatnya mobilitas.

"Dampak yang tidak diinginkan pun terjadi, yakni perlambatan ekonomi," tegasnya.

Selain faktor ekonomi, William juga menyoroti kondisi transportasi umum di Jakarta. Menurutnya, sebelum menerapkan kebijakan

berbayar, Pemprov DKI perlu memfasilitasi transportasi umum yang jauh lebih baik untuk masyarakat.

"Di Singapura, penerapan ERP dilakukan setelah mereka memiliki transportasi umum yang sangat memadai. Kalau di Singapura, kita jalan kaki 5 menit hingga 10 menit sudah ada halte bus atau stasiun MRT," tuturnya.

William menambahkan, jangkauan transportasi umum di Jakarta juga harus memudahkan warga untuk menjalani mobilitas setiap hari.

"Menurut saya, dua hal ini harus dikaji dulu dan disiapkan dengan matang sehingga penerapan ERP tidak menjadi beban bagi masyarakat," tandasnya.

Akan Diterapkan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memastikan bahwa sistem jalan berbayar elektronik (*electronic road pricing/ERP*) akan diterapkan. Untuk diketahui, aturan soal ERP tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PLLE). "Kalau enggak dimulai, kapan (lagi) dimulainya, kan seperti itu," kata Heru

di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (13/1).

Sembari menunggu peraturan soal ERP rampung disusun, Heru menyatakan akan meningkatkan layanan transportasi umum.

"Kan konsepnya sambil proses itu (penyusunan Raperda PLLE), Pemd (Perminta Daerah) DKI juga harus merapikan misal transjakarta bisa melayani dengan baik, *headway* diperketat, dan seterusnya," ujar Heru.

Dalam kesempatan itu, ia menegakkan bahwa penyusunan Raperda PLLE membutuhkan waktu tergolong lama hingga bisa diimplementasikan.

Ada beberapa tahapan yang harus dilewati, seperti meminta pendapat masyarakat hingga pendapat ahli. "ERP juga aturan-aturan yang dibahas masih lama waktunya," tegas dia.

Heru sebelumnya menyatakan, setelah Raperda PLLE disahkan menjadi perda, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menerbitkan peraturan turunannya. Kata dia, peraturan turunan itu bisa jadi berbentuk keputusan gubernur (*kepgub*) atau peraturan gubernur (*pergub*). ● **yan**

Dishub Kota Depok Akan Tutup 6 Putaran Balik di Jalan Boulevard GDC

DEPOK (IM) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok berencana menutup putaran balik atau u-turn di Jalan Boulevard Grand Depok City pada 25 Januari mendatang. Kepala Dishub Kota Depok, Eko Herwiyanto mengatakan, penutupan akan dilakukan dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Boulevard Grand Depok City.

"Salah satu upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mengurangi angka kecelakaan," kata Eko saat dikonfirmasi, Jumat (13/1).

Selain itu, Eko menyebutkan, masih banyak pengendara yang tak menaati batas maksimum kecepatan yang sudah ditentukan, yakni 40 kilometer/jam.

"Karena dengan kondisi jalan yang cukup bagus saat ini menyebabkan kurangnya perhatian pengendara dalam mematuhi batas kecepatan," ujar dia.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi Dishub Kota Depok dengan Satlantas Polres Metro De-

pok memutuskan untuk enam putaran balik di jalan tersebut. "Selain hasil evaluasi kami juga dalam rangka merespon permintaan masyarakat," imbuh dia.

Adapun enam putaran balik di sepanjang Jalan Boulevard Grand Depok City segmen Simpang KSU - Sektor Melati pada 25 Januari 2023, di antaranya: 1. Putaran (u-turn) depan PLN 2. Putaran (u-turn) Jembatan Mandor Samin 3. Putaran (u-turn) depan Gedung PGRI 4. Putaran (u-turn) depan Al-Azhar 5. Putaran (u-turn) depan Cluster De'Caspa 6. Putaran (u-turn) depan Lantana. ● **yan**

Heru Tetapkan Rumah Ibu Fatmawati sebagai Bangunan Cagar Budaya

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menetapkan Rumah Ibu Fatmawati di Jakarta Selatan sebagai bangunan cagar budaya. Penetapan itu termasuk dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 1207 Tahun 2022 tentang Penetapan Rumah Ibu Fatmawati sebagai Bangunan Cagar Budaya.

"Menetapkan Rumah Ibu Fatmawati sebagai Bangunan Cagar Budaya," demikian bunyi keputusan kesatu Heru Budi yang dikutip Jumat (13/1).

Heru meneken *kepgub* tersebut pada 27 Desember 2022. Rumah Ibu Fatmawati berlokasi di Jalan Sriwijaya Raya Nomor 26, Kelurahan

Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Luas bangunannya kurang lebih 718 meter persegi dengan luas tanah mencapai 1.400 meter persegi. Batas penetapan bangunan cagar budaya dibagi menjadi sisi utara, selatan, barat, dan timur.

Berikut rinciannya:

1. Sebelah utara: Rumah Tinggal (Jalan Sriwijaya Raya Nomor 24)
2. Sebelah selatan: Jalan Sriwijaya III
3. Sebelah barat: Rumah Tinggal (Jalan Sriwijaya Nomor 9)
4. Sebelah timur: Jalan Sriwijaya Raya

Dalam *kepgub* 1207/2022 tertera tiga pertimbangan Heru mene-

tapkan Rumah Ibu Fatmawati sebagai bangunan cagar budaya. Salah satunya adalah rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) sesuai Berita Acara Rekomendasi Nomor 181/TACB/Tap/Jaksel/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022.

"Sehingga layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya," demikian bunyi *kepgub* itu.

kepgub Heru Budi juga menuliskan, Rumah Ibu Fatmawati didirikan antara 1955-1956 dengan gaya arsitektur vila yang populer di era 1950-an. Rumah tersebut dirancang khusus untuk Ibu Fatmawati, istri Presiden pertama RI Soekarno, sebagai Ibu Negara Republik Indonesia Pertama. ● **yan**



SKYWALK KEBAYORAN LAMA SEGERA BEROPERASI

Sejumlah kendaraan melintas di bawah jembatan penyeberangan orang (JPO) atau "Skywalk" di Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (13/1). JPO tersebut menghubungkan Stasiun Kebayoran Lama dengan Halte Transjakarta di Kebayoran Lama sebagai sistem transportasi yang terintegrasi antara kereta commuter dengan bus Transjakarta yang akan mulai dioperasikan pada tanggal 17 Januari 2023.

PENGUMUMAN PT SUKSES GANDA LESTARI

Dengan ini diumumkan bahwa PT SUKSES GANDA LESTARI, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), telah melakukan konversi hutang Perseroan kepada PT KERTA MULYA SARIPAKAN, berkedudukan di Jakarta Barat senilai Rp.8.190.000.000,- (delapan miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah) menjadi 8.190 (delapan ribu seratus sembilan puluh) lembar saham Perseroan berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham tertanggal 30 Desember 2022 No.401, dibuat di hadapan HANNYWATI GUNAWAN, S.H., Notaris di Jakarta.

Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 14 Januari 2023

Direksi PT SUKSES GANDA LESTARI

DP DYNAPLAST

Direksi PT Dynaplast, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa:

1. Sehubungan dengan Fasilitas Kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Singapore Branch (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Bank") yang diperoleh Perseroan bersama-sama dengan Dynaplast Asia Pte. Ltd. dan PT Dynaplast Indonesia, Perseroan telah menjaminkan aset-aset Perseroan sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank ("Aset Yang Dijaminkan").
2. Informasi mengenai rincian Aset Yang Dijaminkan telah tersedia di kantor pusat Perseroan di Menara Dynaplast Lt.9-10, Jl. MH. Thamrin No.1 Lippo Karawaci, Tangerang - Banten, dan dipersialkan bagi para pemegang saham dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi tersebut.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Tangerang, 14 Januari 2023

Unduk dan atas nama Perseroan
Direksi